



Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karawang

Dida Rizki Rhamadan¹⁾, Gun Gun Gumilar²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jalan HS. Ronggo Waluyo, Pusuerjaya, Kec. Telukjambe Timur
Kab.Karawang

didarizkiramadhan@gmail.com¹⁾
gungun.gumilar@fisip.unsika.ac.id²⁾

Abstrak

Organisasi masyarakat (Ormas) merupakan organisasi yang memegang peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Konflik antar ormas dikatakan sebagai konflik sosial yang dapat berupa konflik antar ormas, konflik antar warga, dan konflik antar suku, agama, ras dan golongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pembinaan ormas di Kabupaten Karawang. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori strategi pemberdayaan menurut Edi Suharto (2017) yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang melakukan pencegahan agar tidak terjadinya konflik antar ormas yaitu berupa pembinaan dan pemberdayaan kepada ormas yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan kepada masing-masing ormas di Kabupaten Karawang.

Kata Kunci :Strategi, Ormas, Karawang

Abstract

Community organizations are organizations that play an important role in fighting for the rights of the people in the life of the state. Conflicts between organizations are said to be social conflicts which can be in the form of conflicts between mass organizations, conflicts between citizens, and conflicts between ethnic groups, religions, races and groups. This study aims to identify and analyze the strategy of the National Unity and Politics Agency in fostering mass organizations in Karawang Regency. This type of research is descriptive with a qualitative approach. This study uses the theory of empowerment strategies according to Edi Suharto (2017) which consists of enabling, strengthening, protecting, supporting, and maintaining. The results showed that the Kesbangpol office in Karawang Regency took precautions so that there would be no conflict between mass organizations, namely in the form of coaching and empowering mass organizations by improving the quality of human resources through education, training and coaching regarding national insight to each mass organization in Karawang Regency.

Keywords: Strategy, Ormas, Karawang.



PENDAHULUAN

Di Indonesia organisasi masyarakat (ormas) merupakan organisasi yang memegang peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas sendiri adalah organisasi yang biasanya didirikan oleh masyarakat dengan sukarela yang berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, kegiatan, yang dimana bertujuan untuk mendukung dan membantu aktivitas dan kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tujuan ormas adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat disimpulkan bahwa ormas bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Secara umum, misi dari setiap Ormas dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, adalah menyediakan pilihan-pilihan yang beragam dan berkualitas kepada masyarakat, termasuk melahirkan pemimpin, pada semua bidang kehidupan. Kedua, menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih berbagai pilihan yang ditawarkan kepadanya.

Dinamika perkembangan ormas dan perubahan system pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga diharapkan terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan Pendidikan kepada masyarakat yang dimana mengarah pada kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta timbulnya rasa dorongan yang kuat pada masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional, dan diharapkan terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berorganisasi bagi masyarakat.

Di Kabupaten Karawang, berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Karawang bagian Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, jumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karawang telah mencapai 250 lebih ormas yang sudah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan kesatuan bangsa dan politik sampai saat ini.

Dilihat dari keseharian ormas pada saat ini hanya sekedar kelompok yang di isi penuh oleh individu-individu dan melakukan kegiatan yang positif kepada masyarakat. Selanjutnya perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh anggota ormas tidak mencerminkan kewajibannya sebagai ormas. Seperti salah satu contoh perilaku ormas yang terlibat dalam kehidupan masyarakat adalah premanisme, pemalakan, pungutan liar yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di setiap tempat.

Di Kabupaten Karawang akhir-akhir ini ada berbagai macam permasalahan yang dilakukan oleh ormas yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai ormas. Sebagai contoh permasalahan yang terjadi pada bulan januari 2020 di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang , terdapat konflik antar ormas yang melibatkan organisasi Pemuda Pancasila dengan organisasi Laskar NKRI yang sampai saat ini belum diketahui penyebab terjadinya konflik kedua ormas tersebut. satunya konflik yang dilakukan oleh ormas tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Karawang sejauh ini menyelesaikan permasalahan konflik antar ormas dengan cara melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para ormas. Namun tindakan tersebut dirasa belum cukup. Karena koordinasi dan komunikasi pada dasarnya dilakukan setelah permasalahan tersebut terjadi. Sebaiknya perlu adanya formulasi atau tindakan pencegahan konflik dari pemerintah daerah dan instansi yang terkait, agar dapat meminimalisir terjadinya konflik tersebut dimasa mendatang. Pencegahan konflik tersebut dapat berupa pembinaan atau pemberdayaan kepada ormas. Dengan dilakukannya pemberdayaan, diharapkan agar

ormas tersebut dapat melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai ormas demi menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan Bangsa.

Dalam penelitian ini menggunakan teori menurut menurut Edi Suharto (2017) yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Prayoga S.H pada tahun 2013 yang berjudul “Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat berdasarkan uu no.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan” akan tetapi terdapat perbedaan dan persamaannya, dalam hal perbedaannya yaitu dalam segi teori penelitian, fokus penelitian dan lokus penelitian, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan Organisasi Masyarakat. Selanjutnya, peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian yang dilakukan oleh Catur Wibowo pada tahun 2015, yang berjudul “Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan Oleh pemerintah”. Akan tetapi terdapat persamaan dan perbedaan, dalam hal perbedaannya yaitu dari segi Teori dan dari segi persamaannya penelitian ini sama memfokuskan kepada pengawasan Organisasi Masyarakat Oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pembinaan ormas di Kabupaten Karawang dari pemungkinan penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

METODE

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga penelitian akan berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan untuk mengetahui dan memahami Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pemberdayaan Ormas di Kabupaten Karawang. Lokasi penelitian ini di fokuskan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang Jl. A. Yani No. 1 Karawang, Jawa Barat. Pada hari senin tanggal 10 Februari Tahun 2020. Metode penelitian di dalamnya tersusun berbagai cara, Teknik dan strategi dalam melakukan penelitian di lapangan. Dalam hal mencari sumber data peneliti melakukan sumber data skunder. Dalam hal teknik pengumpulan data menggunakan 3 tahapan yakni: studi pustakan, studi lapangan (observasi & wawancara), dan dokumentasi. Serta dalam teknis analisis data yakni: reduksi data dan penyajian data.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan Hasil penelitian yang merupakan penjelasan yang terjadi di lapangan dalam hal pembuktian bagaimana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Karawang hasil penelitian yang ditunjukkan didapatkan data dan informasi melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan yang menjadi aktor dalam proses pelaksanaan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian di lapangan mengacu pada empat indikator manajemen strategi menurut Edi Suharto (2017) yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

1. Pemungkinan

Pemungkinan yaitu menciptakan sebuah suasana atau iklim yang memungkinkan suatu potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal atau menguntungkan. Dan pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari suatu sekat-sekat kultural dan struktural yang dapat menghambat suatu masyarakat.

Dalam indikator pemungkinan bila merujuk kedalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas.

Dalam melakukan pemberdayaan tersebut, Pemerintah/Pemerintah daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan cara fasilitasi kebijakan, melalui peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan oleh peneliti kurangnya komunikasi dari pemerintah kepada setiap Ormas terkait sosialisasi yang dilaksana oleh pemerintah seperti adanya perbedaan waktu pembinaan di setiap Ormas, serta masih belum maksimalnya fungsi Ormas untuk masyarakat yang seharusnya Ormas itu lebih dekat dengan masyarakat, dan juga lebih membantu masyarakat.

2. Penguatan

Penguatan yaitu memperkuat suatu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam memecahkan suatu masalah dan memenuhi setiap kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dan pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan kemampuan atau kepercayaan diri masyarakat yang akan menunjang kemandirian mereka.

Dalam indikator penguatan pada strategi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten karawang mengenai program pembinaan organisasi masyarakat perlu diketahui pada pembinaan ini pemerintah daerah membuat kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada ormas-ormas yang ada di kabupaten Karawang. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja ormas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program tersebut.

Dari hasil observasi dilapangan oleh peneliti pembinaan yang dibuat oleh KESBANGPOL memberi manfaat yang baik bagi setiap ormas, agar terciptanya Organisasi yang profesional serta menciptakan sumber daya manusia menjunjung tinggi nilai kebangsaan.

3. Perlindungan

Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok- kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Pada dimensi perlindungan yang di berikan oleh KESBANGPOL kepada setiap Ormas melalui pembinaan Pendidikan tentang Moral, Kebangsaan dan Politik penanaman nilai-nilai kebangsaan agar menjaga kondusifitas antar lembaga ormas, dan mengantisipasi terjadinya konflik lembaga.

Dari hasil observasi dilapangan oleh peneliti, belum maksimalnya pembinaan yang diselenggarakan oleh KESBANGPOL karena masih terjadinya konflik setiap Ormas, yang seharusnya bersinergi antara setiap Ormas lainnya agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menciptakan Kabupaten Karawang yang kondusif.

4. Penyokongan

Penyokongan dalam hal ini memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Dalam dimensi penyokongan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan pembinaan kepada setiap Ormas agar menciptakan sinergitas antar

lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat saling berkoordinasi di setiap program pembinaan kepada setiap lembaga.

Berdasarkan pengamatan penelitian untuk pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menanamkan nilai nasionalisme, dan membangun masyarakat karawang yang harmonis, dan berbudi luhur. namun belum adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada setiap elemen masyarakat agar masyarakat dapat ikut andil dalam setiap program yang dilaksanakan.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan yaitu memelihara sebuah kondisi yang kondusif agar tetap terjalannya keseimbangan antara distribusi kekuasaan dengan berbagai kelompok dalam suatu masyarakat. Dan pemberdayaan juga harus mampu menjamin keselarasan serta keseimbangan yang memungkinkan setiap masyarakat dapat memperoleh kesempatan berusaha.

Pada dimensi yang terakhir ini perihal pemeliharaan sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan kepada setiap Ormas, karena untuk mendukung roda organisasi agar terciptanya suatu ekosistem ekonomi mandiri.

Dari hasil penelitian dilapangan Pemeliharaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat membantu bagi setiap Ormas karena agar dapat menjalankan roda Organisasi dan membangun sitem ekonomi mandiri dalam masyarakat, namun pada kenyataannya pemeliharaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum merata kepada setiap Ormas hal itu dapat menyebabkan diskriminasi antara Ormas dan dapat menyebabkan konflik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Good Urban Governance Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bekasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemungkinan

Kurangnya sosialisasi terkait pembinaan program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada setiap Ormas dan adanya perbedaan waktu pembinaan disetiap Ormas.

2. Penguatan

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pembinaan memberikan manfaat yang baik bagi setiap Ormas untuk menjalankan Organisasi, menjaga nilai-nilai Kebangsaan, dan menjadikan Organisasi Masyarakat yang Profesional.

3. Perlindungan

Belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Badan karena masih terdapat konflik antar ormas, sehingga akan berdampak negatif bagi pandangan masyarakat kepada setiap Ormas.

4. Penyokongan

Pembinaan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama ini hanya dilakukan kepada Organisasi masyarakat saja, belum terealisasikannya pembinaan yang menyeluruh kepada semua elemen masyarakat.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan yang diberikan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik berupa anggaran untuk Ormas yang dimana belum sepenuhnya merata diberikan

kepada setiap Ormas, hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi dan akan menyebabkan konflik antar Ormas.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi berjudul “STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG.” maka peneliti memberikan saran dalam rangka untuk menciptakan Organisasi Masyarakat yang profesional dan menciptakan ekosistem ekonomi mandiri .

1. Pemungkinan

Pada dimensi pemungkinan saran dari peneliti adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus meningkatkan kembali sosialisasi terkait pembinaan untuk setiap Ormas, karena pembinaan tersebut dapat mempengaruhi jalannya roda Organisasi, dan untuk meningkatkan fungsi Ormas di dalam masyarakat.

2. Penguatan

Pada dimensi penguatan saran dari peneliti yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan lebih baik lagi meningkatkan intensitas kepada setiap Ormas agar terciptanya suatu Ormas yang profesional.

3. Perlindungan

Pada dimensi perlindungan saran dari peneliti yaitu meningkatkan pembinaan kepada setiap Ormas agar tidak terjadinya suatu konflik Ormas dan menindak tegas kepada Ormas yang menyalahi aturan.

4. Penyokongan

Pada dimensi penyokongan saran dari peneliti yaitu mensosialisasikan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada semua elemen masyarakat agar terciptanya sinergitas antar lembaga dan masyarakat.

5. Pemeliharaan

Pada dimensi pemeliharaan saran dari peneliti adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pemerataan pemeliharaan untuk setiap Ormas agar tidak terjadinya diskriminasi dan menimbulkan konflik antar Ormas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan proposal ini, mudah-mudahan kontribusi yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulisan dan penyusunan jurnal ini, tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Terelepas dari itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih, antara lain kepada : Hanny Purnamasari, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing I. Gun Gun Gumilar, S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing II. Dr. Kusrin, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang. Dr. Mayasari., S.S., M.Hum selaku Wakil Dekan FISIP I. Maulana Rifa'i, S.IP., MA selaku Wakil Dekan FISIP II. Semua Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Para Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah membantu proses administrasi. Kedua orang tua peneliti, Mamah dan Bapak atas doa dan dukungan yang tak henti – henti. Tidak cukup hanya dengan mendedikasikan proposal ini atas segala pengorbanan untuk peneliti, terimakasih Mamah dan Bapak. Semoga Allah membalasnya dengan surga yang dijanjikan-Nya kelak *di yaumul akhir*. Teman-teman Peruri Squad, Ferdiansyah, Fahmi idris, Fahmy Wiam, Gilang Angga, Firman, Nanda Galih, Ganda Gunawan, yang telah berjuang Bersama. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan khususnya kelas C angkatan 2016. Teruntuk Intan Sholihat yang sudah menemani, memberi semangat dan doa yang tiada hentiya. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). Manajemen penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- David, Fred.R. (2011). Manajemen Strategis: Konsep-Konsep. Edisi Duabelas.n Salemba Empat, Jakarta.
- Creswell W, Jhon.(2016). Research Design,PustakaPelajar, Yogyakarta
- Edi Suharto. (2017). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hadiyanti, Puji. (2008). Jurnal Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif di PKMB Rawasari, Jakarta Timur.
- Langi, Engelina, Jalisrin, Jova. (2015). Jurnal Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Pramono, Eddy, Gatot. (2015). Jurnal Keamanan Nasional. Vol. 1.
- Prianto, Luhur, Andi. (2012). Jurnal Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
- Soekanto, Soerdjono, (1981) :Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta
- Rendi, Herdiansah, Ganjar, Ari. (2016). Jurnal Peran organisasi masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menopang Pembangunan di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan